



Katalog BPS : 9207.53

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN 2009-2011



**Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
NUSA TENGGARA TIMUR
MENURUT PENGGUNAAN
2009 – 2011**

<https://ntt.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
NUSA TENGGARA TIMUR
MENURUT PENGGUNAAN
2009 – 2011**

ISSN : 0854 – 9303
Nomor Publikasi : 53552.0001
Katalog BPS : 9207.53
Ukuran Buku : 21 cm × 28 cm
Jumlah Halaman : ix + 45

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:

*Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. R. Suprpto No. 5, Kupang 85111*

BOLEH DIKUTIP DENGAN MENYEBUTKAN SUMBERNYA

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN
2009 – 2011**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Ir. S. Aden Gultom, MM

Penyunting : Sofan, S.Si, M.Si

Penulis : Indra A. S. Souri, SST, M.Si
Ir. Tutik Endari
I Made Juli Ardana, SST
Dewi Kurnia Ayuningtyas, SST

Pengolah Data : Sonia Amabi

<https://ntt.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan 2009-2011 merupakan lanjutan dari publikasi sejenis yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Publikasi ini disusun oleh Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur.

Selain menyajikan berbagai tabel dasar dan turunan tentang data Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur yang dirinci menurut komponen penggunaan, dalam publikasi ini disajikan pula analisis deskriptif tentang perkembangan perekonomian Nusa Tenggara Timur dari sisi penggunaan pada kurun 2009-2011. Untuk lebih memperjelas berbagai terminologi yang digunakan, disajikan pula konsep, definisi, dan metodologi penghitungan yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini.

Data tahun 2011 yang disajikan masih bersifat sangat sementara. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat sampai dengan batas waktu penerbitan, beberapa data masih belum terkumpul secara lengkap. Penyempurnaan dan revisi terhadap data tersebut akan dilakukan pada penerbitan berikutnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan publikasi ini diucapkan banyak terima kasih. Kritik dan saran untuk penyempurnaan publikasi di masa datang sangat diharapkan.

91 Kupang, 1 April 2012
Kepala Badan Pusat Statistik
Nusa Tenggara Timur,



Ir. S. Aden Gultom, MM
NIP. 19590605 198103 1 005

KOMPONEN KONSUMSI RUMAHTANGGA DAN LEMBAGA SWASTA NIRLABA PADA PDRB NUSA TENGGARA TIMUR , 2009-2011

Konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba merupakan penyerap terbesar penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur. Dalam tiga tahun terakhir rata-rata proporsi komponen konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba mencapai 75,06 persen dari PDRB. Jika dilihat dari tahun berjalan dan mengamati tahun-tahun sebelumnya maka dalam kurun waktu tersebut ada kecenderungan penggeseran pola dari makanan ke non makanan. Laju pertumbuhan konsumsi rumahtangga untuk kelompok makanan pada periode 2009-2011 terlihat berfluktuasi sedangkan untuk kelompok bukan makanan cenderung melambat.

KOMPONEN EKSPOR IMPOR DAN PERDAGANGAN ANTAR PULAU PADA PDRB NUSA TENGGARA TIMUR , 2009-2011

Perekonomian Nusa Tenggara Timur agaknya masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap wilayah lain. Hal ini dapat dilihat dari proporsi impor dan antar pulau masuk yang masih merupakan terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba dengan rata-rata kontribusinya sebesar 39,68 persen. Tingginya proporsi impor dalam perekonomian ini seharusnya mendapat perhatian dan penanganan karena merupakan cerminan dari tingginya pengaruh 'luar' dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur.

Pemenuhan permintaan ekspor dan perdagangan antar pulau keluar menempati proporsi terbesar keempat dan perkembangannya menunjukkan kecenderungan semakin menurun. Dalam tiga tahun terakhir rata-rata proporsi komponen ekspor dan perdagangan antar pulau keluar mencapai 19,40 persen dari PDRB Nusa Tenggara Timur.

Nilai **ekspor dan perdagangan antar pulau keluar** dari Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2009-2011 cenderung semakin meningkat. Walaupun nilai ekspor dan perdagangan antar pulau keluar tersebut relatif tinggi, namun nilai impor dan perdagangan antar pulau masuk ke Nusa Tenggara Timur ternyata jauh lebih tinggi lagi. Kondisi tersebut mengakibatkan neraca perdagangan luar negeri dan perdagangan antar pulau Provinsi Nusa Tenggara Timur terus menanggung defisit dalam kurun 2009-2011. Pada tahun 2009 defisit neraca perdagangan Nusa Tenggara Timur sebesar minus 4,20 triliun rupiah dan meningkat menjadi minus 5,53 triliun rupiah pada tahun 2010. Demikian juga yang terjadi pada tahun 2011 defisit tersebut meningkat kembali menjadi minus 7,34 triliun rupiah.

Jika diamati lebih jauh, ternyata peran perdagangan antar pulau lebih besar dibandingkan dengan peran perdagangan luar negerinya. Begitu juga peranan perdagangan antar pulau masuk memiliki peranan yang cukup besar terhadap total impor dan perdagangan antar pulau masuk.

KOMPOSISI PENGGUNAAN PDB INDONESIA, 2009-2011

Perkembangan komposisi penggunaan PDB Indonesia dari Konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba dalam kurun 2009-2011 menempati urutan pertama dengan rata-rata kontribusi sebesar 56,63 persen. Pembentukan modal tetap bruto dalam kurun yang sama menempati urutan kedua dengan rata-rata kontribusi sebesar 31,74 persen. Pada urutan ketiga ditempati oleh komponen ekspor dengan rata-rata kontribusi sebesar 25,04 persen terhadap PDB Indonesia.

<https://ntt.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Tabel-Tabel Lampiran	ix
I. Pendahuluan	2
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
1.2 PDRB Menurut Komponen Penggunaan	3
1.3 Konsep dan Definisi	5
1.4 Metode Penghitungan dan Sumber Data	9
II. Tinjauan PDRB Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan	15
2.1 Komposisi Penggunaan PDRB	15
2.2 Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB	20
III. Perkembangan Peranan Komponen PDRB Penggunaan.....	23
3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	23
3.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	25
3.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	27
3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	29
3.5 Ekspor dan Antar Pulau Neto	32
Tabel-Tabel Lampiran	36-44
Daftar Pustaka	45

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
2.1 Komposisi Penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Berlaku	16
2.2 Komposisi Penggunaan PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku	18
2.3 Laju Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB NTT Atas Dasar Harga Konstan 2000	21

<https://ntt.bps.go.id>

DAFTAR TABEL-TABEL LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
1. Penggunaan Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur, Tahun 2009-2011	36
2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan, Tahun 2009-2011	37
3. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan, Tahun 2009-2011	38
4. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan, Tahun 2009-2011.....	39
5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan, Tahun 2009-2011	40
6. Konsumsi Rumahtangga Nusa Tenggara Timur, Tahun 2009-2011	41
7. Ekspor Neto Nusa Tenggara Timur, Tahun 2009-2011	42
8. Penggunaan Produk Domestik Bruto Indonesia, Tahun 2009-2011	43
9. Peranan Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Penggunaan, Tahun 2009-2011	44

BAB I

PENDAHULUAN

- ✓ *Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*
 - ✓ *PDRB Menurut Komponen Penggunaan*
 - ✓ *Konsep dan Definisi*
 - ✓ *Metode Penghitungan dan Sumber Data*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang umum digunakan untuk melihat kemampuan sumber daya perekonomian suatu wilayah. Jika PDRB suatu wilayah semakin besar maka semakin besar pula sumber daya ekonomi di wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya.

Untuk menghitung PDRB dapat digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pengertian PDRB pada masing-masing pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Pada pendekatan produksi**, PDRB didefinisikan sebagai jumlah dari semua nilai yang berhasil ditambahkan terhadap barang dan jasa melalui kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua unit ekonomi yang ada di suatu wilayah (*region*) dalam periode waktu tertentu.
- b. **Pada pendekatan pendapatan**, PDRB adalah jumlah dari seluruh balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi oleh semua unit ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.
- c. **Pada pendekatan pengeluaran**, PDRB merupakan jumlah dari pengeluaran konsumen akhir atas barang dan jasa akhir di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Barang dan jasa akhir yang dimaksudkan dalam hal ini adalah barang dan jasa yang tidak digunakan sebagai input dalam suatu kegiatan produksi. Sedangkan konsumen akhir terdiri dari rumah tangga, lembaga nirlaba, pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, ekspor dan impor (sebagai pengurang).

Hasil penghitungan PDRB berdasarkan ketiga pendekatan tersebut secara teori tidak akan berbeda satu sama lain. Namun demikian dalam prakteknya sering terdapat selisih atau diskrepansi statistik yang merupakan akibat dari kekurangakuratan data.

PDRB suatu wilayah pada umumnya dihitung dengan menggunakan dua sistem penilaian, yaitu:

- a. Penilaian **atas dasar harga berlaku**. Dalam sistem penilaian ini maka seluruh barang dan jasa yang dijadikan sebagai dasar penghitungan PDRB dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada periode penghitungan.
- b. Penilaian **atas dasar harga konstan**. Dalam sistem ini maka barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung PDRB dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada periode tertentu yang dijadikan sebagai periode dasar. Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan dalam publikasi ini dilakukan dengan menggunakan harga tahun 2000 sebagai tahun dasar.

Hasil penghitungan PDRB dengan dua sistem penilaian tersebut memiliki kegunaan yang berbeda. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat ukuran atau skala perekonomian suatu wilayah, dan juga menjadi dasar untuk mengamati struktur perekonomian suatu wilayah. Sementara PDRB atas dasar harga konstan lebih banyak digunakan untuk mengamati perkembangan tingkat produksi dari seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga konstan juga merupakan data dasar yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

1.2 PDRB Menurut Komponen Penggunaan

Produk dari suatu kegiatan produksi dapat dikelompokkan menjadi dua sesuai dengan pemanfaatannya, yaitu **produk antara** dan **produk akhir**. Produk antara adalah produk dari suatu unit ekonomi yang digunakan sebagai input dalam kegiatan produksi yang dilakukan oleh unit ekonomi lain. Sedangkan produk akhir adalah produk yang dihasilkan oleh suatu unit ekonomi dan langsung digunakan atau dikonsumsi sebagaimana adanya, tanpa melalui kegiatan produksi lebih lanjut.

Seperti yang telah disinggung pada sub bab sebelumnya, jumlah dari semua produk (barang dan jasa) akhir yang dikonsumsi oleh seluruh konsumen akhir (bukan untuk kepentingan produksi) di suatu wilayah akan sama dengan PDRB wilayah tersebut. PDRB yang dihitung dengan menggunakan pendekatan inilah yang dikenal sebagai PDRB menurut komponen penggunaan.

Produk akhir dari suatu kegiatan ekonomi pada dasarnya memiliki dua kegunaan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan untuk investasi. Produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mencakup semua produk yang habis digunakan atau dikonsumsi selama periode penghitungan, dan tidak digunakan untuk menghasilkan produk lain. Dengan demikian, produk yang dikonsumsi secara ekonomi telah 'keluar' dari aktivitas produksi. Sementara produk yang digunakan untuk investasi

mencakup semua barang dan jasa yang tidak habis digunakan dalam periode penghitungan dan secara otomatis akan menambah akumulasi 'kesejahteraan' wilayah.

Dengan menggunakan simbol Y untuk PDRB, C untuk konsumsi dan I untuk investasi, maka dapat dituliskan hubungan identitas:

$$Y = C + I$$

Dalam hubungan ini tersirat bahwa pendefinisian C dan I harus dibuat sedemikian rupa sehingga seluruh PDRB yang dihasilkan oleh suatu wilayah telah benar-benar habis digunakan, baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk kepentingan investasi.

Penggolongan permintaan terhadap produk akhir (disebut sebagai permintaan akhir) menjadi konsumsi dan investasi memang terasa sangat sederhana dan agregatif. Pada kenyataannya, baik konsumsi maupun investasi terdiri dari berbagai jenis pengeluaran.

Pengeluaran konsumsi secara umum dapat dibedakan menjadi konsumsi perorangan dan konsumsi publik. Konsumsi perorangan mencakup konsumsi yang dilakukan rumahtangga dan lembaga nirlaba (tidak mencari untung). Ciri dari konsumsi perorangan adalah: (i) mencakup pengeluaran perorangan dalam kapasitas sebagai pribadi dan (ii) pengeluaran tersebut harus berupa barang dan jasa yang habis digunakan maksimal dalam satu tahun. Pengeluaran dari lembaga nirlaba dicakup sebagai komponen konsumsi karena pada kenyataannya lembaga atau institusi jenis ini memang tidak melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Sementara itu konsumsi publik mencakup pengeluaran konsumsi terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi yang dicatat dalam hal ini hanyalah pengeluaran atas barang dan jasa yang habis digunakan pada tahun berjalan, sedangkan pengeluaran untuk membangun jalan dan sejenisnya dicakup dalam investasi.

Secara sederhana, pengeluaran untuk investasi akan mencakup semua jenis pengeluaran untuk barang dan jasa yang tidak habis digunakan dalam tahun berjalan. Pengeluaran investasi pada umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan level perekonomian, semisal peningkatan kapasitas untuk menghasilkan pendapatan atau kepuasan di masa yang akan datang. Pengeluaran investasi pada dasarnya dapat dibedakan atas investasi domestik dan investasi luar wilayah. Investasi domestik terdiri dari pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok/inventori. Sedangkan investasi luar wilayah berupa ekspor dan antar pulau keluar dikurangi dengan impor dan antar pulau masuk.

Dengan demikian hubungan identitas dalam perekonomian dapat digambarkan secara lebih rinci sebagai berikut:

$$Y = C_h + C_g + I_f + I_s + (X - M)$$

di mana Y = PDRB, C_h = konsumsi rumahtangga dan lembaga nirlaba, C_g = konsumsi pemerintah, I_f = pembentukan modal tetap domestik bruto, I_s = perubahan stok/inventori, X = ekspor dan antar pulau keluar, dan M = impor dan antar pulau masuk.

Masing-masing peubah pada sisi sebelah kanan dari persamaan identitas tersebut pada hakekatnya merupakan komponen penggunaan dari PDRB suatu wilayah. Atau dengan kata lain jelas bahwa PDRB suatu wilayah dapat dirinci menurut penggunaannya, yaitu untuk konsumsi (rumahtangga, lembaga nirlaba, pemerintah) dan investasi (pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok/inventori, ekspor dan antar pulau keluar, dikurangi impor dan antar pulau masuk).

Penyusunan PDRB menurut komponen penggunaan memiliki peran yang cukup penting, terutama untuk melakukan analisis pola permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu entitas ekonomi. Melalui analisis ini dapat diketahui masing-masing proporsi PDRB yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau investasi. Jika proporsi konsumsi terlalu besar dapat diduga bahwa peningkatan kapasitas perekonomian di wilayah yang bersangkutan akan relatif berat, karena sumber daya yang digunakan untuk investasi akan mengecil. Dari analisis ini juga dapat diketahui seberapa besar 'kebocoran' yang harus diderita sebagai akibat dari besarnya barang dan jasa yang harus didatangkan dari luar wilayah untuk memenuhi permintaan yang ada. Bagi perencana pembangunan di bidang ekonomi informasi ini tentu saja dapat memperkaya masukan dalam merumuskan berbagai kebijakan yang akan diambil.

1.3 Konsep dan Definisi

Sesuai dengan uraian pada bagian terdahulu maka PDRB menurut penggunaan dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir, baik untuk keperluan konsumsi maupun investasi. Dalam publikasi ini permintaan akhir dikelompokkan menjadi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok/inventori, dan ekspor dan antar pulau keluar. Mengingat untuk memenuhi permintaan tersebut ada sebagian barang yang harus didatangkan

dari luar wilayah Nusa Tenggara Timur, maka jumlah dari seluruh komponen tersebut harus dikurangi dengan nilai impor barang dan antar pulau masuk.

Konsep dan definisi yang digunakan dalam menghitung setiap komponen penggunaan tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut:

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa untuk tujuan konsumsi dan habis digunakan dalam periode satu tahun, dikurangi dengan hasil penjualan neto barang-barang bekas dan sisa. Pengeluaran konsumsi rumahtangga mencakup pengeluaran untuk bahan makanan, minuman, pakaian, bahan bakar dan jasa. Pembelian barang-barang yang tidak dapat direproduksi seperti hasil karya seni, barang-barang antik dan lain-lain juga dicatat sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Selain itu pengeluaran konsumsi rumahtangga mencakup juga pembelian barang-barang modal yang dapat diraba seperti mobil, motor, *furniture*, radio dan lain-lain yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi. Namun demikian pembelian rumah tidak dicakup. Pengeluaran untuk sewa rumah dan perbaikannya, pengeluaran untuk rekening listrik, air, telepon dan lain-lain juga dicatat sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Begitu juga pengeluaran untuk pemakaian jasa dari pihak lain (jasa kesehatan, pendidikan, rekreasi/hiburan dan jasa lainnya) dicakup dalam pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dihitung berdasarkan konsep pengeluaran konsumsi rumah tangga penduduk (residen), yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga yang menetap di suatu wilayah domestik ditambah dengan pembelian langsung oleh rumah tangga penduduk di luar wilayah, dikurangi dengan pengeluaran bukan penduduk yang dilakukan di wilayah yang bersangkutan.

b. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba meliputi pembelian dan penerimaan transfer dalam bentuk barang dan jasa, pembayaran upah dan gaji, penyusutan dan pajak tak langsung neto yang dibayar oleh lembaga yang bersangkutan, dikurangi penjualan barang dan jasa yang dihasilkan. Lembaga swasta nirlaba adalah lembaga/badan swasta yang dalam menjalankan kegiatannya tidak mencari keuntungan. Contoh lembaga swasta nirlaba adalah organisasi serikat buruh, persatuan para ahli, organisasi pelatih, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, dan sebagainya yang khusus melayani masyarakat dan tidak menciptakan keuntungan untuk lembaga.

Unit usaha dari lembaga swasta ini bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Lembaga swasta nirlaba yang keuangan dan pengawasan sepenuhnya atau sebagian besar ditangani oleh pemerintah, merupakan bagian dari pengeluaran kegiatan pemerintah dan tidak dicakup dalam pengeluaran lembaga swasta nirlaba.

c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup semua jenis pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan sipil dan pertahanan. Dalam hal ini pemerintah yang dimaksudkan terdiri dari departemen, lembaga non departemen dan lembaga pemerintah lainnya serta pemerintah daerah tingkat I, tingkat II dan pemerintah desa. Pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh badan usaha milik pemerintah seperti Perum, Perjan, Perseroan, PN dan sebagainya tidak dicakup di sini, karena kegiatan dari masing-masing badan usaha tersebut merupakan kegiatan produksi.

Pengeluaran konsumsi pemerintah antara lain terdiri dari pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang. Termasuk di dalamnya belanja perjalanan, pemeliharaan dan pengeluaran lain yang bersifat rutin. Penerimaan dari hasil kegiatan produksi barang dan jasa tidak dicakup ke dalam pengeluaran konsumsi pemerintah.

d. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

Pembentukan modal tetap domestik bruto mencakup pembuatan dan pembelian barang modal baru dari dalam wilayah dan pembelian barang modal baru dan bekas dari luar wilayah. Barang modal yang dimaksudkan adalah barang atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi dan pada umumnya memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun.

Pembentukan modal tetap domestik bruto dapat berupa pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi atau dalam bentuk mesin dan alat perlengkapan lainnya. Barang-barang yang tidak diproduksi kembali seperti tanah dan cadangan mineral tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto. Akan tetapi pengeluaran untuk meningkatkan penggunaan tanah seperti pembukaan hutan untuk dijadikan areal perkebunan, daerah pemukiman, bendungan dan lain-lain serta pengeluaran untuk perluasan areal pertambangan merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto. Penjualan neto dari barang-barang modal bekas dan barang-barang afkiran dari dalam daerah juga tidak termasuk dalam penghitungan pembentukan modal tetap bruto karena barang-barang tersebut sudah dihitung sebagai barang modal pada waktu

pertama kali dibeli. Pembelian atau pembuatan barang-barang tahan lama untuk keperluan perlengkapan militer seperti barang-barang untuk pertahanan, tank, alat-alat persenjataan, bangunan konstruksi dan barang-barang pertahanan lainnya tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto karena barang-barang konstruksi yang digunakan militer tersebut bersifat konsumtif dan diperlakukan sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah.

e. Perubahan Stok/Inventori

Perubahan stok/inventori merupakan selisih antara stok/inventori pada akhir tahun dengan stok/inventori pada awal tahun. Stok/inventori yang dimaksudkan adalah barang jadi yang belum sempat digunakan, barang setengah jadi dan barang-barang masih dalam proses penyelesaian, baik yang merupakan barang konsumsi maupun barang modal. Stok/inventori barang konsumsi dapat disimpan oleh rumahtangga, pedagang (di toko) atau oleh perusahaan. Begitu juga stok/inventori modal dapat disimpan oleh rumahtangga atau pelaku ekonomi lain.

Bangunan yang belum selesai tidak termasuk dalam stok/inventori tetapi dimasukkan ke dalam komponen pembentukan modal tetap. Stok/inventori barang pada pemerintah adalah barang-barang yang dibeli untuk keperluan strategi seperti bahan pangan dan bahan bakar yang disediakan guna keperluan pada waktu kritis. Tanaman hutan dan tanaman keras yang belum diambil hasilnya tidak termasuk dalam stok/inventori, akan tetapi pemeliharaan ternak untuk dipotong dikategorikan sebagai stok/inventori.

f. Ekspor dan Impor

Ekspor dan impor merupakan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Kegiatan ekspor dan impor dapat berupa ekspor dan impor barang, jasa pengangkutan, jasa asuransi, komunikasi, pariwisata dan jasa lainnya. Pembelian langsung oleh penduduk negara lain yang dilakukan di suatu negara dicatat sebagai ekspor dari negara tempat terjadinya transaksi. Sedangkan pembelian langsung oleh penduduk suatu negara yang dilakukan di luar negeri diperlakukan sebagai impor oleh negara yang bersangkutan.

g. Antar Pulau Keluar dan Masuk

Konsep antar pulau keluar dan antar pulau masuk sama dengan konsep untuk ekspor dan impor, hanya saja lingkup transaksinya terbatas pada antar daerah di suatu negara.

1.4 Metode Penghitungan dan Sumber Data

Penghitungan setiap komponen penggunaan dalam PDRB Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan pendekatan yang berbeda satu sama lain. Hal ini disesuaikan dengan ketersediaan data yang digunakan sebagai dasar penghitungan. Secara singkat metode penghitungan dan sumber datanya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Konsumsi Rumah tangga

Data dasar yang digunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Sayangnya, SUSENAS tidak diselenggarakan setiap tahun. Sehingga untuk tahun-tahun yang data SUSENAS-nya tidak tersedia, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga terpaksa diestimasi menggunakan model elastisitas pendapatan terhadap perubahan permintaan barang-barang konsumsi.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pengeluaran konsumsi rumah tangga di Nusa Tenggara Timur idealnya harus mencakup pula konsumsi yang dilakukan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur di luar wilayah dikurangi dengan konsumsi penduduk asing (luar Nusa Tenggara Timur) yang dilakukan di wilayah ini. Namun demikian karena keterbatasan data, komponen ini belum dapat ditaksir. Sehingga dalam hal ini terpaksa digunakan asumsi bahwa konsumsi penduduk Nusa Tenggara Timur sama dengan konsumsi penduduk luar Nusa Tenggara Timur yang dilakukan di wilayah ini.

b. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Data dasar yang digunakan untuk menghitung pengeluaran lembaga swasta nirlaba adalah hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Namun demikian karena jumlah sampel dalam SKLNP relatif kecil, maka diperlukan penyesuaian berdasarkan hasil pengumpulan data lain seperti SKPR dan sejenisnya.

Penghitungan pengeluaran konsumsi lembaga nirlaba dilakukan dengan menjumlahkan perkiraan biaya antara dari setiap lembaga nirlaba yang ada di Nusa Tenggara Timur.

c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

Sumber data yang digunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi pemerintah adalah realisasi belanja rutin dan pembangunan baik dari APBN maupun APBD. Jadi dalam hal ini mencakup realisasi pengeluaran

pemerintah pusat yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur dan realisasi pengeluaran pemerintah daerah tingkat I, II dan pemerintahan desa.

Selanjutnya nilai pengeluaran konsumsi pemerintah Nusa Tenggara Timur diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang, biaya perbaikan ringan dan pengeluaran rutin yang lain dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Hankam. Juga termasuk disini adalah belanja pegawai dan belanja bahan dari belanja pembangunan.

Untuk memperoleh nilai pengeluaran pemerintah pada masing-masing komponen dilakukan sebagai berikut:

i. Belanja pegawai terdiri dari:

- Belanja pegawai dari belanja rutin yang terdiri dari upah gaji, tunjangan beras maupun uang, pakaian dinas dan lain-lain belanja pegawai baik Daerah, Pusat maupun Hankam.
- Belanja pegawai yang berasal dari belanja pembangunan diolah dari laporan realisasi keuangan proyek APBD dan proyek-proyek APBN.

ii. Belanja Barang mencakup:

- Belanja barang dari belanja rutin (tidak termasuk belanja barang modal)
- Belanja barang dari belanja pembangunan diolah dari laporan realisasi keuangan proyek APBD dan proyek APBN.

iii. Biaya perbaikan ringan dan pemeliharaan rutin; seperti biaya perbaikan/pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan sebagainya.

iv. Belanja rutin lainnya; seperti biaya perjalanan dinas dan sebagainya.

v. Penyusutan barang modal.

Data realisasi pengeluaran keuangan Daerah Tingkat I, II dan Desa diperoleh dari laporan realisasi keuangan daerah masing-masing tingkat (K1, K2 dan K3).

Data mengenai realisasi anggaran rutin pemerintah pusat diperoleh dari setiap instansi jawatan tingkat Provinsi yang meliputi data belanja pegawai, belanja barang dan biaya pemeliharaan, sedang belanja pegawai dan belanja barang yang berasal dari belanja pembangunan berasal dari BAPPEDA Tingkat I yang meliputi data belanja pembangunan sektoral (dari APBN), Inpres SD, Inpres Desa (Bangdes), Inpres Kesehatan, Inpres Tingkat II, Inpres Pasar dan belanja pembangunan daerah yang bersumber dari Biro Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Data belanja pertahanan dan keamanan diperoleh dari masing-masing kesatuan militer di kabupaten dan provinsi (KOREM, DANSIONAL, DANLANUD, KOWIL, KEPOLISIAN), yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang.

Nilai pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga yang berlaku diperoleh dengan menjumlahkan nilai belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan dan belanja rutin lainnya dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Hankam.

Sedangkan nilai konsumsi atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan mendeflasikan nilai atas dasar harga yang berlaku dengan jumlah pegawai untuk belanja pegawai dan biaya perjalanan serta Indeks Umum HPB tanpa ekspor untuk belanja barang, biaya perbaikan ringan dan pemeliharaan rutin dan biaya rutin lainnya.

d. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Cara yang digunakan dalam menaksir nilai pembentukan modal tetap bruto Nusa Tenggara Timur adalah dengan pendekatan arus komoditi, yaitu menghitung nilai barang modal baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah Nusa Tenggara Timur.

Pembentukan modal tetap bruto hasil produksi lokal ditaksir dari nilai barang modal yang dihasilkan oleh sektor industri dan sektor konstruksi serta pembentukan modal tetap bruto yang dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan pembentukan modal tetap bruto yang berasal dari luar Nusa Tenggara Timur (melalui impor dan antar pulau masuk), ditaksir melalui arus barang-barang modal yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur melalui impor dari luar negeri dan antar pulau masuk (hasil pengolahan BPP laut di pelabuhan-pelabuhan laut yang ada di Nusa Tenggara Timur).

Sektor Industri

Barang-barang modal yang dihasilkan oleh sektor industri antara lain dihasilkan oleh industri galangan perahu layar/perahu motor, meubel dan alat-alat pertanian. Nilai barang modal diperoleh dari perhitungan PDRB sektoral, baik atas dasar harga berlaku, maupun atas dasar harga konstan 2000.

Sektor Konstruksi

Nilai barang modal yang dihasilkan oleh sektor bangunan ditaksir dengan menggunakan rasio barang modal terhadap total nilai output sektor konstruksi baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

Sektor Pemerintahan

Nilai pembentukan modal tetap bruto oleh sektor pemerintahan antara lain terdiri dari biaya reboisasi dan penghijauan, pengadaan ternak bibit, sapi perah dan lain-lain yang diperoleh dari pengolahan realisasi belanja pembangunan (APBD dan APBN).

Sebenarnya pembentukan modal yang dilakukan oleh pemerintah mencakup pula biaya konstruksi dan industri, akan tetapi mengingat komponen ini sudah dihitung pada sektornya maka tidak dihitung lagi di sini.

Nilai atas dasar harga konstan 2000 ditaksir dengan cara mendeflasikan nilai pembentukan barang modal atas dasar harga berlaku dengan menggunakan Indeks Umum HPB tanpa ekspor.

Impor dan Antar Pulau Masuk

Pembentukan modal tetap bruto yang berasal dari impor dan antar pulau masuk pada dasarnya merupakan barang modal, baik barang modal baru maupun barang modal bekas, yang dihasilkan oleh sektor industri di luar wilayah Nusa Tenggara Timur. Barang modal ini antara lain berupa mesin-mesin, kendaraan, peralatan berat dan sebagainya. Nilai barang-barang modal atas dasar harga konstan 2000 dari luar wilayah tersebut ditaksir dengan cara revaluasi.

e. Ekspor dan Antar Pulau Neto

Untuk menaksir besarnya nilai ekspor neto Nusa Tenggara Timur atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai ekspor dan antar pulau keluar dikurangi dengan nilai impor dan nilai antar pulau masuk. Datanya diperoleh dari Kanwil Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pusat Statistik. Nilai atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara revaluasi.

f. Perubahan Stok/Inventori

Perubahan stok/inventori pada dasarnya adalah perubahan persediaan barang-barang yang berasal dari pembelian (baik untuk keperluan produksi suatu kegiatan ekonomi maupun untuk dijual lagi), dan barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum terjual (baik dalam bentuk barang jadi maupun barang setengah jadi).

Pemegang stok/inventori terdiri dari produsen, pedagang dan pemerintah. Stok/inventori yang dikuasai oleh pemerintah mencakup barang-barang yang dibeli untuk keperluan strategi, seperti bahan pangan dan bahan

bakar yang disediakan guna keperluan khusus (misalnya untuk mengatasi krisis dan sejenisnya).

Alat-alat berat seperti kapal dan lain-lain yang sedang dalam proses pengerjaan merupakan stok/inventori yang dikuasai oleh produsen. Sementara bangunan yang sedang dikerjakan tidak termasuk stok/inventori akan tetapi menjadi bagian dari pembentukan modal tetap bruto.

Mengingat keterbatasan data maka nilai perubahan stok/inventori dalam penghitungan PDRB menurut penggunaan diperlakukan sebagai sisaan (residual) dari PDRB sektoral setelah dikurangi komponen-komponen penggunaan lainnya.

<https://ntt.bps.go.id>

BAB II

TINJAUAN PDRB NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN

- ✓ *Komposisi Penggunaan PDRB*
- ✓ *Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB*

BAB II

TINJAUAN PDRB NUSA TENGGARA TIMUR

MENURUT PENGGUNAAN

Sesuai dengan uraian terdahulu, PDRB dari sisi penggunaan akan mencakup seluruh produk akhir yang digunakan atau dikonsumsi oleh para konsumen akhir. Dengan kata lain PDRB dapat pula dipandang sebagai seluruh produk yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir.

Permintaan akhir, yaitu permintaan yang bukan untuk keperluan produksi, pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu permintaan akhir domestik dan permintaan akhir dari luar wilayah. Permintaan akhir domestik terdiri dari konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto. Sedangkan permintaan akhir dari luar wilayah terdiri dari ekspor (dari luar negeri) dan antar pulau keluar (dari wilayah lain di dalam negeri). Pada prakteknya, penyediaan produk akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi suatu wilayah seringkali tidak mampu memenuhi seluruh permintaan akhir yang ada. Dalam hal ini maka perlu didatangkan produk akhir dari luar wilayah, yang terdiri dari impor dan antar pulau masuk.

Uraian berikut akan mengamati komposisi penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur dan perkembangannya.

2.1 Komposisi Penggunaan PDRB

Komposisi penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur dalam kurun 2009 sampai 2011 pada umum dalam tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal yang sama juga terjadi dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.1a. dapat dilihat bahwa proporsi terbesar penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah untuk memenuhi konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba. Secara rata-rata dalam tiga tahun terakhir, konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba mencapai 75,06 persen dari PDRB. Tahun 2009 proporsi komponen ini sebesar 74,92 persen tetapi tahun 2010 mengalami sedikit penurunan menjadi 74,75 persen. Pada tahun 2011 proporsinya mengalami peningkatan menjadi 75,51 persen terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.1
Komposisi Penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur
Atas Dasar Harga Berlaku

(Persen)

Rincian	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga ^{a)}	74,92	74,75	75,51	75,06
2. Konsumsi Pemerintah	21,09	22,23	22,60	21,97
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	15,31	16,47	17,59	16,46
4. Ekspor ^{b)}	20,21	19,22	18,77	19,40
5. Impor ^{c)} (-)	37,59	39,16	42,30	39,68
6. Perubahan Stok/Inventori ^{d)}	6,05	6,49	7,83	6,79
PDRB	100,00	100,00	100,00	

Keterangan:

a) Termasuk pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba

b) Untuk NTT termasuk antar pulau keluar

c) Untuk NTT termasuk antar pulau masuk

d) Angka residual

**) Angka sementara*

****) Angka sangat sementara*

Penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur untuk memenuhi permintaan ekspor dan antar pulau keluar proporsinya merupakan terbesar keempat dan perkembangannya menunjukkan kecenderungan semakin menurun. Pada tahun 2009 proporsi penggunaan untuk komponen ini sebesar 20,21 persen terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur, dan tahun 2010 proporsi ekspor dan antar pulau keluar ini turun menjadi 19,22 persen. Demikian juga dengan keadaan tahun 2011, dimana proporsi ekspor menjadi 18,77 persen.

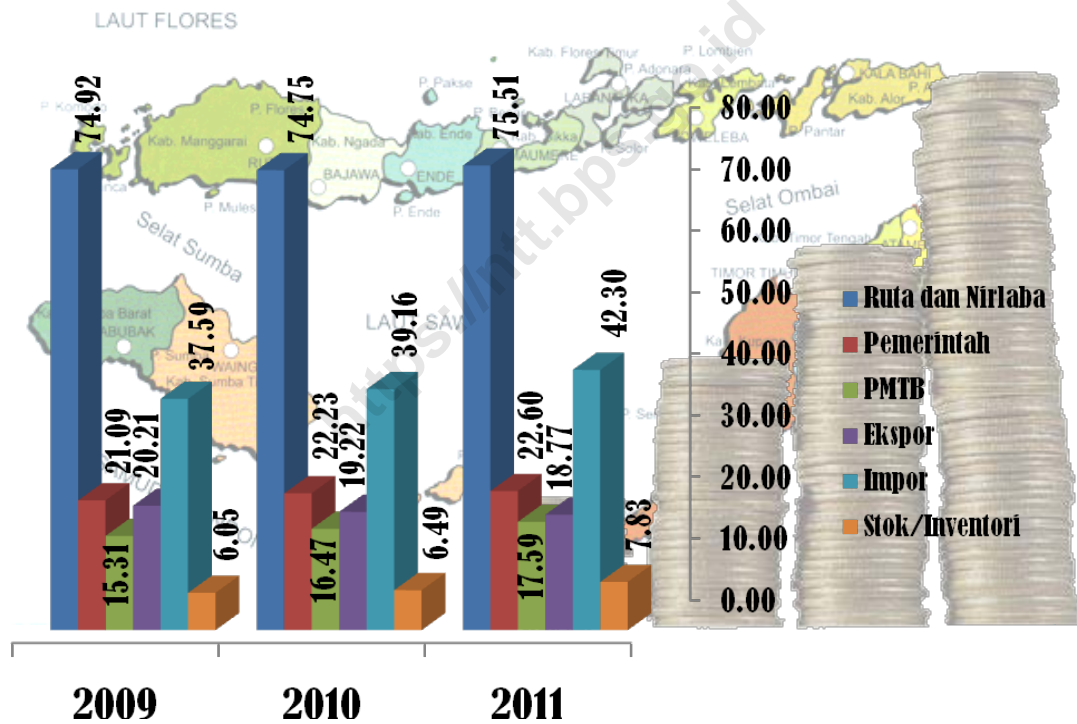
Perekonomian Nusa Tenggara Timur agaknya masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap wilayah lain. Hal ini dapat dilihat dari proporsi impor dan antar pulau masuk dalam kurun 2009-2011. Penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur dari sisi impor proposinya merupakan terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba dan dalam perkembangan tiga tahun terakhir secara rata-rata kontribusinya sebesar 39,68 persen. Pada tahun 2009 proporsi impor dalam penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur sebesar 37,59 persen kemudian di tahun 2010 proporsi ini mengalami peningkatan menjadi 39,16 persen. Kondisi ini tidak berbeda pada tahun 2011 dimana proporsi penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur dalam komponen impor meningkat menjadi 42,30 persen. Angka ini menunjukkan bahwa untuk

memenuhi permintaan para konsumen akhir di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2011 sekitar 42,30 persen produk yang digunakan masih harus didatangkan melalui impor dan antar pulau masuk. Tingginya proporsi impor dalam perekonomian ini seharusnya mendapat perhatian dan penanganan karena merupakan cerminan dari tingginya pengaruh 'luar' dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur.

Tahun 2009 proporsi pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur sebesar 15,31 persen, pada tahun 2010 proporsinya mengalami peningkatan menjadi 16,47 persen. Demikian halnya tahun 2011 proporsi penggunaan dalam pembentukan modal tetap bruto menjadi 17,59 persen terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur.

Gambar 2.1.

Komposisi PDRB NTT Menurut Penggunaan



Sementara itu konsumsi yang diserap oleh pemerintah di Nusa Tenggara Timur proporsinya mengalami peningkatan selama periode 2009-2011. Pada tahun 2009 konsumsi pemerintah 21,09 persen dari PDRB Nusa Tenggara Timur. Proporsi tersebut pada tahun 2010 meningkat menjadi 22,23 persen, kemudian pada tahun 2011 menjadi 22,60 persen terhadap pembentukan PDRB Nusa Tenggara Timur.

Pola penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan pola penggunaan PDB pada level nasional. Konsumsi rumahtangga masih memiliki proporsi yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Hanya saja proporsi pembentukan modal tetap bruto dalam perekonomian Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan proporsi komponen tersebut dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur.

Konsumsi Rumahtangga:

Perkembangan komposisi penggunaan PDB Indonesia dari Konsumsi rumahtangga pada tahun 2009 sebesar 58,70 persen dan perkembangan dua tahun terakhir komposisi penggunaan rumahtangga terhadap PDB Indonesia relatif menurun, yaitu pada tahun 2010 komposisi sebesar 56,61 persen terhadap PDB Indonesia. Sementara tahun 2011 kondisi komposisi rumahtangga dalam penggunaan PDB Indonesia menjadi sebesar 54,58 persen terhadap PDB Indonesia. Berikut komposisi penggunaan konsumsi rumahtangga dan komponen lainnya dalam komposisi penggunaan PDB Indonesia dalam periode tersebut di atas selengkapnya.

Tabel 2.2
Komposisi Penggunaan PDB Indonesia
Atas Dasar Harga Berlaku

<i>(Persen)</i>				
Rincian	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga ^{a)}	58,70	56,61	54,58	56,63
2. Konsumsi Pemerintah	9,59	9,04	8,99	9,21
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,11	32,08	32,02	31,74
4. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	24,16	24,62	26,33	25,04
5. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	21,35	22,94	24,92	23,07
6. Perubahan Stok/Inventori ^{b)}	(0,13)	0,49	0,75	0,37
PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	

Keterangan:

a) Termasuk pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba

b) Angka residual

**) Angka sementara*

****) Angka sangat sementara*

Konsumsi Pemerintah:

Komposisi penggunaan dari komponen konsumsi pemerintah secara nasional dalam tiga tahun terakhir 2009-2011 secara rata-rata 9,21 persen. Pada tahun 2009 komposisi konsumsi pemerintah sebesar 9,59 persen terhadap PDB Indonesia menurun menjadi 9,04 persen pada tahun 2010. Tahun 2011 keadaan komposisi penggunaan konsumsi pemerintah terhadap PDB Indonesia kembali menurun menjadi 8,99 persen.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB):

Komposisi pembentukan modal tetap bruto dalam kurun waktu 2009-2011 secara rata-rata 31,74 persen terhadap PDB Indonesia, Pada tahun 2009 komposisi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) terhadap PDB Indonesia sebesar 31,11 persen. Komposisi ini meningkat menjadi 32,08 persen pada tahun 2010. Kondisi ini berbeda ketika pada tahun 2011 dimana komposisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menurun menjadi 32,02 persen.

Ekspor:

Komposisi Ekspor dalam penggunaan terhadap PDB Indonesia dalam tahun 2009-2011 dengan rata-rata komposisi penggunaan ekspor 25,04 persen. Pada tahun 2009 komposisi penggunaan ekspor terhadap PDB Indonesia sebesar 24,16 persen. Pada tahun 2010 komposisi penggunaan ekspor terhadap PDB Indonesia meningkat menjadi 24,62 persen dan di tahun 2011 komposisinya kembali meningkat menjadi 26,33 persen.

Impor:

Komposisi Impor dalam penggunaan PDB Indonesia dalam kurun waktu 2009-2011 secara rata-rata 23,07 persen. Pada tahun 2009 komposisi komponen Penggunaan terhadap PDB Indonesia sebesar 21,35 persen kemudian meningkat menjadi 22,94 persen pada tahun 2010. Pada tahun 2011 kondisi komposisi impor dalam penggunaan PDB Indonesia meningkat menjadi sebesar 24,92 persen.

Perubahan Stok/Inventori:

Komposisi perubahan stok/inventori dalam penggunaan PDB Indonesia dalam kurun waktu 2009-2011 secara rata-rata komposisinya sebesar 0,37 persen.

2.2 Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB

2.2.1 Konsumsi Rumah Tangga

Laju pertumbuhan dalam penggunaan komponen konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur, selama kurun waktu 2009-2011 secara rata-rata sebesar 3,25 persen. Namun dilihat berdasarkan kondisi pada tahun berjalan komponen ini cukup mengalami fluktuasi, hal ini nampak pada tahun 2009 dimana laju pertumbuhannya sebesar 4,94 persen. Pada tahun 2010 pertumbuhannya mengalami perlambatan menjadi 1,67 persen. Tahun 2011 terjadi peningkatan laju pertumbuhan menjadi sebesar 3,12 persen.

2.2.2 Konsumsi Pemerintah

Laju pertumbuhan dalam penggunaan komponen konsumsi pemerintah terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur, selama kurun waktu 2009-2011 mengalami kecenderungan berfluktuasi secara rata-rata sebesar 6,38 persen. Pada tahun 2009 laju pertumbuhannya sebesar 2,38 persen. Terjadi peningkatan laju pertumbuhan pada tahun 2010, yakni menjadi sebesar 11,28 persen. Pada tahun 2011 terjadi perlambatan laju pertumbuhan yang sangat signifikan hingga menjadi sebesar 5,48 persen.

2.2.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Laju pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2009-2011 menunjukkan indikasi mengembirakan di tahun 2009, dengan rata-rata sebesar 12,09 persen. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan mencapai 15,80 persen, kemudian mengalami perlambatan menjadi 9,77 persen pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan laju pertumbuhan menjadi sebesar 10,71 persen.

Gambaran sepintas ini memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas produksi yang dicerminkan oleh pembentukan modal tetap bruto (yang antara lain berupa pembelian baru untuk mesin atau barang modal lainnya) mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2009 pada perekonomian Nusa Tenggara Timur.

2.2.4 Ekspor dan Antar Pulau Keluar

Ekspor dan antar pulau keluar Nusa Tenggara Timur selama periode 2009-2011 terlihat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 ekspor dan antar pulau keluar mengalami laju pertumbuhan sebesar 1,31 persen. Laju pertumbuhan pada tahun 2010 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya menjadi sebesar 1,22 persen. Tahun 2011 laju pertumbuhan mengalami peningkatan menjadi 1,85

persen dibanding tahun 2010. Peningkatan volume dan banyaknya jenis komoditi yang diantarpulaukan mempengaruhi nilai antar pulau keluar pada dua tahun terakhir ini.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB NTT
Atas Dasar Harga Konstan 2000

<i>(Persen)</i>				
Rincian	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga ^{a)}	4,94	1,67	3,12	3,25
2. Konsumsi Pemerintah	2,38	11,28	5,48	6,38
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	15,80	9,77	10,71	12,09
4. Ekspor ^{b)}	1,31	1,22	1,85	1,46
5. Impor ^{c)} (-)	0,49	6,48	7,32	4,76
PDRB	4,29	5,23	5,63	5,05

Keterangan:

a) Termasuk pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba

b) Untuk NTT termasuk antar pulau keluar

c) Untuk NTT termasuk antar pulau masuk

**) Angka sementara*

****) Angka sangat sementara*

2.2.5 Impor dan Antar Pulau Masuk

Dalam kurun waktu 2009-2011 laju pertumbuhan impor dan antar pulau masuk mengalami peningkatan, secara rata-rata laju pertumbuhan dalam kurun waktu tersebut sebesar 4,76 persen. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan impor dan antar pulau masuk hanya sebesar 0,49 persen. Akan tetapi, mulai mengalami peningkatan laju pertumbuhan pada 2 tahun berikutnya yaitu menjadi 6,48 persen dan pada tahun 2011 pertumbuhan komponen ini meningkat menjadi sebesar 7,32 persen.

BAB III

PERKEMBANGAN PERANAN KOMPONEN PENGUNAAN PDRB NUSA TENGGARA TIMUR

- ✓ *Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga*
- ✓ *Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba*
 - ✓ *Pengeluaran Konsumsi Pemerintah*
 - ✓ *Pembentukan Modal Tetap Bruto*
 - ✓ *Ekspor dan Antar Pulau Neto*

BAB III

PERKEMBANGAN PERANAN KOMPONEN PENGUNAAN PDRB NUSA TENGGARA TIMUR

Ulasan pada bab ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan setiap komponen penggunaan PDRB secara lebih rinci. Pembahasan akan mencakup dari sisi komposisi (proporsi) dan pertumbuhannya.

3.1 Konsumsi Rumahtangga

3.1.1 Pengeluaran:

Pengeluaran konsumsi rumahtangga yang dimaksudkan di sini hanya konsumsi rumahtangga saja, tanpa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh lembaga swasta nirlaba.

Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga di Nusa Tenggara Timur terhadap PDRB adalah untuk membayar pengeluaran kelompok makanan dalam kurun waktu 2009-2011 secara rata-rata 54,41 persen sedangkan non makanan hanya sekitar 16,87 persen. Jika dilihat dari tahun berjalan dan mengamati tahun-tahun sebelumnya maka dalam kurun waktu tersebut ada kecenderungan penggeseran pola dari makanan ke non makanan. Pada tahun 2009 porsi konsumsi rumahtangga menurut pengeluaran makanan sebesar 54,32 persen dan tahun berikutnya (2010) melemah menjadi 54,19 persen. Selanjutnya pada tahun 2011 kembali menguat menjadi 54,73 persen.

Tabel 3.1
Proporsi Konsumsi Rumahtangga Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kelompok Pengeluaran Nusa Tenggara Timur

<i>(Persen)</i>				
Jenis Pengeluaran	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kelompok Makanan	54,32	54,19	54,73	54,41
2. Kelompok Bukan Makanan	16,90	16,81	16,90	16,87
KONSUMSI RUMAHTANGGA (Dalam Triliun Rupiah)	17,22	19,69	22,34	

^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Pada tahun 2009 proporsi pengeluaran konsumsi non makanan sebesar 16,90 persen sedikit melemah menjadi 16,81 persen pada tahun 2010, kemudian kembali pada proporsi sebelumnya menjadi 16,90 persen pada tahun 2011.

3.1.2 Laju pertumbuhan:

Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga untuk kelompok makanan pada periode 2009-2011 terlihat berfluktuasi, begitu pula halnya pada kelompok bukan makanan. Secara rata-rata laju pertumbuhan konsumsi makanan sekitar 3,33 persen sedangkan non makanan sebesar 2,55 persen. Secara mendalam dapat dilihat dari perkembangan konsumsi makanan dalam kurun waktu 2009-2011 terlihat dalam Tabel. 3.2.

Pada tahun 2009 konsumsi kelompok makanan tumbuh 5,21 persen lantas melemah menjadi 1,58 persen pada tahun 2010. Kemudian menguat kembali pada tahun 2011 menjadi 3,20 persen.

Untuk kelompok bukan makanan pada tahun 2009 tumbuh 4,46 persen lantas melambat menjadi 1,05 persen pada tahun 2010. Dan menguat pula pada tahun 2011 menjadi sebesar 2,13 persen.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah tangga Nusa Tenggara Timur
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kelompok Pengeluaran

<i>(Persen)</i>				
Jenis Pengeluaran	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kelompok Makanan	5,21	1,58	3,20	3,33
2. Kelompok Bukan Makanan	4,46	1,05	2,13	2,55
KONSUMSI RUMAHTANGGA	5,03	1,45	2,94	3,14

Keterangan : ^{*)} Angka sementara
^{**)} Angka sangat sementara

3.2 Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

3.2.1 Pengeluaran:

Berbeda dengan pengeluaran konsumsi rumahtangga yang dapat dirinci menurut kelompok makanan dan bukan makanan, data yang tersedia untuk pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba hanya rincian menurut jenis lembaga, yaitu lembaga keagamaan dan lembaga sosial lainnya.

Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa proporsi pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba di Nusa Tenggara Timur sepanjang kurun waktu 2009-2011 didominasi oleh lembaga keagamaan, yaitu secara rata-rata sebesar 95,94 persen. Dalam kurun waktu tersebut proporsi pengeluaran lembaga keagamaan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 porsi pengeluaran konsumsi lembaga keagamaan di Nusa Tenggara Timur sebesar 96,00 persen dan sedikit menguat pada tahun 2010 menjadi 96,06 persen. Terakhir, pada tahun 2011 porsi pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba pada pengeluaran lembaga keagamaan di Nusa Tenggara Timur melemah menjadi 95,76 persen.

Tabel 3.3
Proporsi Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Nusa Tenggara Timur
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Lembaga

<i>(Persen)</i>				
Jenis Pengeluaran	2009	2010^{*)}	2011^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Lembaga Keagamaan	96,00	96,06	95,76	95,94
2. Lembaga Sosial Lainnya	4,00	3,94	4,24	4,06
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00
LEMBAGA SWASTA NIRLABA (Dalam Miliar Rupiah)	895,27	1.041,28	1.212,37	

Keterangan :) Angka sementara*

****) Angka sangat sementara*

Proporsi pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba pada pengeluaran lembaga sosial dan lainnya dalam kurun waktu 2009-2011 secara rata-rata 4,06 persen. Pada tahun 2009 proporsi pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba pada pengeluaran lembaga sosial lainnya di Nusa Tenggara Timur sebesar 4,00 persen kemudian melemah menjadi 3,94 persen pada tahun 2010. Pada tahun 2011 proporsi komponen ini kembali menguat menjadi 4,24 persen.

3.2.2 Laju pertumbuhan:

Laju pertumbuhan konsumsi lembaga keagamaan memiliki pola perkembangan yang terus meningkat, sementara pengeluaran konsumsi lembaga sosial lainnya cenderung mengalami fluktuasi. Perkembangan laju pertumbuhan konsumsi lembaga keagamaan di Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2009-2011 memiliki rata-rata sebesar 5,35 persen.

Pada tahun 2009 laju pertumbuhan konsumsi lembaga keagamaan mengalami pertumbuhan sebesar 3,16 persen (lihat Tabel 3.4). Pada tahun 2010 pertumbuhannya mengalami peningkatan menjadi 6,31 persen, dan terus meningkat pada tahun 2011 hingga mencapai laju pertumbuhan sebesar 6,57 persen.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Jenis Lembaga

<i>(Persen)</i>				
Jenis Pengeluaran	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Lembaga Keagamaan	3,16	6,31	6,57	5,35
2. Lembaga Sosial Lainnya	6,27	4,47	6,77	5,84
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA	3,28	6,24	6,58	5,37

Keterangan :*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sementara perkembangan laju pertumbuhan konsumsi lembaga swasta nirlaba untuk lembaga sosial lainnya pada kurun waktu 2009-2011 memiliki rata-rata sebesar 5,84 persen. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan konsumsi lembaga swasta nirlaba untuk lembaga sosial lainnya mencapai 6,27 persen. Pada tahun 2010 konsumsi lembaga swasta nirlaba untuk lembaga sosial lainnya tumbuh dan mengalami perlambatan menjadi 4,47 persen tetapi di tahun 2011 pertumbuhannya mengalami percepatan kembali hingga mencapai 6,77 persen.

3.3 Konsumsi Pemerintah

3.3.1 Pengeluaran:

Proporsi terbesar pengeluaran konsumsi pemerintah di Nusa Tenggara Timur adalah untuk belanja pegawai bruto, yaitu belanja pegawai sebelum dipotong pajak dan berbagai potongan lainnya yang berfluktuasi pada periode 2009-2011 (lihat Tabel 3.5). Pada tahun 2009 proporsi belanja pegawai bruto terhadap pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 57,33 persen kemudian melambat menjadi 55,83 persen pada tahun 2010, kemudian proporsinya sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2011 hingga mencapai 56,47 persen.

Tabel 3.5
Proporsi Konsumsi Pemerintah Nusa Tenggara Timur
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran

<i>(Persen)</i>				
Jenis Pengeluaran	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Belanja Pegawai Bruto	57,33	55,83	56,47	56,54
2. Belanja Barang	9,81	9,63	9,52	9,65
3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin	6,60	6,51	6,40	6,50
4. Biaya Perjalanan Dinas	9,40	9,31	8,65	9,12
5. Belanja Rutin Lainnya	16,85	18,72	18,96	18,18
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00
KONSUMSI PEMERINTAH (Dalam Triliun Rupiah)	5,10	6,17	7,05	

Keterangan :*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Proporsi terbesar kedua dari pengeluaran konsumsi pemerintah adalah untuk belanja rutin lainnya, yaitu dengan rata-rata tiga tahun terakhir sebesar 18,18 persen. Pada tahun 2009 proporsi Belanja Rutin sebesar 16,85 persen, meningkat menjadi 18,72 persen pada tahun 2010. Proporsi ini terus meningkat hingga pada tahun 2011 menjadi sebesar 18,96 persen. Urutan berikutnya adalah untuk belanja barang dengan rata-rata proporsinya 9,65 persen dalam kurun waktu 2009-2011. Pada tahun 2009 proporsi pengeluaran pemerintah untuk belanja barang sebesar 9,81 persen sedikit menurun hingga menjadi 9,63 persen pada tahun 2010 dan terus menurun hingga menjadi 9,52 persen pada tahun 2011. Selanjutnya biaya perjalanan dinas mendapat porsi dalam penggunaan konsumsi pemerintah rata-rata sebesar 9,12 persen. Perkembangan konsumsi pemerintah dari jenis pengeluaran belanja perjalanan dinas pada tahun 2009 sebesar 9,40

persen menurun menjadi 9,31 persen pada tahun 2010 kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2011 hingga menjadi 8,65 persen. Untuk jenis pengeluaran biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin pada periode 2009-2011 berada pada kisaran 6,40 sampai dengan 6,60 persen. Perkembangan jenis pengeluaran biaya perbaikan dan pemeliharaan pada tahun 2009 proporsinya sebesar 6,60 persen melemah menjadi 6,51 persen pada tahun 2010. Kemudian kembali melemah pada tahun 2011 hingga sebesar 6,50 persen.

3.3.2 Laju Pertumbuhan:

Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah menurut jenis pengeluaran dalam kurun waktu 2009-2011 secara rata-rata 5,35 persen. Jika dilihat dari jenis pengeluaran maka terjadi fluktuasi laju pertumbuhan dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan konsumsi pemerintah masih sebesar 2,38 persen relatif persisten pada tahun 2010 dengan laju pertumbuhan sama yakni sebesar 2,38 persen. Lantas terjadi percepatan pada tahun 2011 dengan laju pertumbuhan menguat hingga menjadi 11,28 persen. Jika dilihat secara menyeluruh maka pada kurun waktu 2009-2011 pengeluaran biaya perjalanan dinas yang memiliki laju pertumbuhan terbesar dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,79 persen. Pengeluaran belanja barang; belanja pegawai bruto; serta biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin; menempati urutan selanjutnya dengan rata-rata masing-masing sebesar 6,50 persen; 6,38 persen dan 6,03 persen.

Tabel 3.6
Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Jenisnya

(Persen)

Jenis Pengeluaran	2009	2010*)	2011**)	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Belanja Pegawai Bruto	6,57	7,19	5,38	6,38
2. Belanja Barang	6,56	7,78	5,16	6,50
3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin	5,35	7,75	4,98	6,03
4. Biaya Perjalanan Dinas	5,05	8,94	6,37	6,79
5. Belanja Rutin Lainnya	-13,38	19,74	11,60	5,99
JUMLAH	2,38	2,38	11,28	5,35

Keterangan :*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Jika diperhatikan secara parsial dalam kurun waktu tersebut seluruh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah memiliki kecenderungan berfluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2011 jenis pengeluaran belanja rutin lainnya merupakan komponen dengan laju pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 11,60 persen, diikuti oleh biaya perjalanan dinas sebesar 6,37 persen. Sedangkan tiga jenis pengeluaran lainnya yakni belanja barang; biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin; serta belanja pegawai bruto masing-masing berkisar pada besaran 5 persen.

3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

3.4.1 Pengeluaran:

Pembentukan modal tetap bruto di Nusa Tenggara Timur dalam kurun 2009-2011 ternyata masih didominasi oleh barang modal domestik (lihat Tabel 3.7) dengan rata-rata sebesar 67,63 persen. Pada tahun 2009 proporsi pengeluaran untuk pembentukan barang modal tetap bruto domestik sebesar 70,01 persen kemudian menurun menjadi 66,21 persen pada tahun 2010. Pada tahun 2011 proporsi pembentukan barang modal tetap bruto untuk domestik sedikit meningkat menjadi sebesar 66,68 persen. Namun demikian, jika dilihat lebih cermat sebagian besar pembentukan modal tetap bruto domestik pada kurun 2009-2011 ternyata didominasi oleh output dari sektor konstruksi, dengan rata-rata proporsi sebesar 65,91 persen. Pada tahun 2009 jenis pengeluaran sektor konstruksi sebesar 68,30 persen dan proporsinya menurun menjadi 64,50 persen pada tahun 2010, kemudian sedikit meningkat menjadi 64,94 persen pada tahun 2011. Besarnya pembentukan barang modal dari konstruksi menunjukkan bahwa kandungan lokal dari pembentukan modal tetap bruto ini sebagian besar adalah berupa bangunan, yang peranannya terhadap peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian kurang terlalu besar.

Sementara itu proporsi pembentukan modal untuk peningkatan kapasitas produksi agaknya belum terlalu besar. Hal ini ditunjukkan oleh masih relatif kecilnya proporsi pembentukan modal dari impor dan perdagangan antar pulau masuk dan dari sektor industri domestik. Proporsi pembentukan modal yang terkecil dari kelompok sektor industri domestik dalam kurun 2009-2011 masih kurang dari 1 persen.

Tabel 3.7
Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto Nusa Tenggara Timur
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Asal Barang

<i>(Persen)</i>				
Jenis Pengeluaran	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Impor dan Antar Pulau Masuk	29,99	33,79	33,32	32,37
2. Domestik	70,01	66,21	66,68	67,63
<i>a. Industri</i>	<i>0,63</i>	<i>0,63</i>	<i>0,67</i>	<i>0,64</i>
<i>b. Konstruksi</i>	<i>68,30</i>	<i>64,50</i>	<i>64,94</i>	<i>65,91</i>
<i>c. Pemerintah^{r)}</i>	<i>1,08</i>	<i>1,08</i>	<i>1,07</i>	<i>1,08</i>
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan :) Angka sementara*

****) Angka sangat sementara*

r) tidak termasuk pengeluaran pemerintah untuk pembentukan modal, konstruksi dan industri yg dikelola pemerintah

3.4.2 Agregat :

Agregat Pembentukan Modal Tetap Bruto menurut asal barang yang berasal dari barang impor dan antar pulau masuk mencapai 1,11 triliun rupiah pada tahun 2009. Pada tahun 2010 meningkat menjadi 1,54 triliun rupiah, dan pada tahun 2011 agregat komponen ini kembali meningkat menjadi sebesar 1,83 triliun rupiah.

Sementara agregat jenis pengeluaran pembentukan barang modal tetap bruto domestik dalam kurun waktu 2009-2011 cenderung meningkat. Pada tahun 2009 komponen yang berasal dari barang domestik dalam pembentukan modal tetap bruto mencapai 2,59 triliun rupiah meningkat menjadi 3,02 triliun rupiah pada tahun 2010 dan menjadi 3,66 triliun rupiah pada tahun 2011.

Jika melihat lebih dalam akan asal barang modal domestik dalam laju pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto maka asal barang dari konstruksi yang cukup baik dalam mendongkrak pencapaian agregat PMTB dalam tiga tahun terakhir ini. Pada tahun 2009 agregat PMTB menurut asal barang dan jenis pengeluaran konstruksi sebesar 2,53 triliun rupiah meningkat menjadi 2,95 triliun rupiah pada tahun 2010. Demikian halnya pada tahun 2011, kembali meningkat menjadi sebesar 3,56 triliun rupiah. Kecenderungan meningkat ini pun terjadi pada agregat komponen industri dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2009 nilai tambah PMTB menurut asal barang dan jenis pengeluaran industri masih sebesar 23,19 miliar rupiah meningkat menjadi 28,95 miliar rupiah

pada tahun 2010. Pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 36,71 miliar rupiah. Hal serupa terjadi pula pada kondisi agregat PMTB dari komponen pemerintah, dimana pada tahun 2009 telah mencapai 39,90 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi sebesar 49,40 miliar rupiah. Pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 58,89 miliar rupiah.

Tabel 3.8
Agregat Pembentukan Modal Tetap Bruto Nusa Tenggara Timur
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Asal Barang

(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Impor dan Antar Pulau Masuk	1 110 428,6	1 543 514,7	1 828 932,5
2. Domestik	2 592 093,7	3 024 941,7	3 659 789,7
a. Industri	23 186,5	28 949,1	36 711,7
b. Konstruksi	2 529 003,9	2 946 595,0	3 564 186,1
c. Pemerintah ^{r)}	39 903,3	49 397,6	58 891,8
JUMLAH	3 702 522,2	4 568 456,3	5 488 722,2

Keterangan :) Angka sementara*

****) Angka sangat sementara*

r) tidak termasuk pengeluaran pemerintah untuk pembentukan modal, konstruksi dan industri yg dikelola pemerintah

3.5 Ekspor dan Antar Pulau Neto

3.5.1. Pengeluaran:

Nilai ekspor dan antar pulau keluar dari Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2009-2011 cenderung semakin meningkat (lihat Tabel 3.9). Pada tahun 2009 nilai ekspor dan antar pulau keluar mencapai 4,89 triliun rupiah dan terus meningkat pada tahun 2010 menjadi 5,33 triliun rupiah dan terus meningkat menjadi 5,86 triliun rupiah pada tahun 2011. Walaupun nilai ekspor dan antar pulau keluar tersebut relatif tinggi, namun nilai impor dan antar pulau masuk ke Nusa Tenggara Timur ternyata jauh lebih tinggi lagi. Pada tahun 2009 nilai impor dan antar pulau masuk ke Nusa Tenggara Timur mencapai 9,09 triliun rupiah dan terus meningkat hingga menjadi 10,86 triliun rupiah pada tahun 2010 dan kembali meningkat pada tahun 2011 menjadi 13,20 triliun rupiah.

Kondisi tersebut mengakibatkan neraca perdagangan luar negeri dan antar pulau di Nusa Tenggara Timur terus menanggung defisit dalam kurun 2009-2011. Pada tahun 2009 defisit neraca perdagangan Nusa Tenggara Timur sebesar minus 4,20 triliun rupiah dan meningkat menjadi minus 5,53 triliun rupiah pada tahun 2010. Demikian juga yang terjadi pada tahun 2011 defisit tersebut meningkat kembali menjadi minus 7,34 triliun rupiah.

Tabel 3.9
Neraca Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau
Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Berlaku

(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2009	2010 ^{a)}	2011 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	4 887 824,1	5 331 313,6	5 855 950,1
2. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	9 089 186,6	10 862 813,8	13 198 760,1
EKSPOR NETO ^{a)}	(4 201 362,5)	(5 531 500,2)	(7 342 810,0)

Keterangan :) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
a) Ekspor dikurangi impor*

Jika diamati lebih jauh, ternyata peran perdagangan antar pulau lebih besar dibandingkan dengan peran perdagangan luar negerinya (lihat Tabel 3.10). Dalam kurun 2009-2011 peranan perdagangan antar pulau keluar berkisar antara 99,07 sampai 99,10 persen terhadap total ekspor dan antar pulau keluar. Begitu juga peranan perdagangan antar pulau masuk memiliki peranan yang cukup besar terhadap total impor dan antar pulau masuk. Pada tahun 2009 peran perdagangan antar pulau masuk mencapai 97,37 persen. Proporsi tersebut relatif stagnan pada tahun 2010 yakni tetap sebesar 97,37 persen. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 97,50 persen.

Tabel 3.10
Komposisi Komponen Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau
Atas Dasar Harga Berlaku Nusa Tenggara Timur

(Persen)

Jenis Pengeluaran	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	100,00	100,00	100,00
- Ekspor	0,90	0,93	0,92
- Antar Pulau Keluar	99,10	99,07	99,08
2. Impor dan Antar Pulau Masuk	100,00	100,00	100,00
- Impor	2,63	2,63	2,50
- Antar Pulau Masuk	97,37	97,37	97,50

Keterangan :) Angka sementara*
****) Angka sangat sementara*

3.5.2 Laju pertumbuhan:

Jika diperhatikan laju pertumbuhannya, tampak bahwa antar pulau keluar memiliki pola perkembangan yang cenderung melambat, sedangkan antar pulau masuk memiliki kecenderungan berfluktuasi (lihat Tabel 3.11). Pada periode tahun 2009-2011 masing-masing komponen mengalami pertumbuhan positif, komponen antar pulau keluar pada tahun 2009 bertumbuh sebesar 1,29 persennamun cenderung melemah pada tahun-tahun berikutnya, dimana pada tahun 2010 menjadi sebesar 1,21 persen, dan pada tahun 2011 hanya mencapai 1,86 persen.

Untuk komponen antar pulau masuk, pada tahun 2009 pertumbuhannya mencapai 0,43 persen melemah menjadi 6,54 persen pada tahun 2010. Sebaliknya, pada tahun 2011 menguat hingga menjadi sebesar 7,41 persen. Namun demikian jika dilihat lebih rinci tampak bahwa masing-masing komponen memiliki kecenderungan bertumbuh positif. Pada tahun 2009 nilai ekspor luar negeri mengalami pertumbuhan sebesar 4,22 persen, kemudian mulai melambat pada tahun 2010 hingga mencapai 1,93 persen. Pada tahun 2011 komponen ekspor terus melambat dengan pencapaian laju pertumbuhan terakhir sebesar 1,04 persen.

Laju pertumbuhan impor luar negeri pada tahun 2009 mencapai 4,27 persen, sementara laju pertumbuhan antar pulau masuk adalah 0,43 persen. Pada tahun 2010 laju pertumbuhan antar pulau masuk menguat menjadi 6,54 persen, sementara impor luar negeri mengalami perlambatan hingga mencapai 2,67 persen. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan antar pulau masuk tetap menguat menjadi sebesar 7,41 persen, sebaliknya komponen impor luar negeri terus mengalami perlambatan hingga menjadi 2,15 persen.

Tabel 3.11
Laju Pertumbuhan Komponen Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau
Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000

<i>(Persen)</i>			
Jenis Pengeluaran	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	1,31	1,22	1,85
- Ekspor	4,22	1,93	1,04
- Antar Pulau Keluar	1,29	1,21	1,86
2. Impor dan Antar Pulau Masuk	0,49	6,48	7,32
- Impor	4,27	2,67	2,15
- Antar Pulau Masuk	0,43	6,54	7,41
EKSPOR NETO a)	(0,38)	12,16	12,66

Keterangan :) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
a) Ekspor dikurangi impor*

TABEL-TABEL LAMPIRAN

<https://ntt.bps.go.id>

Tabel 1
Penggunaan Produk Domestik Regional Bruto
Nusa Tenggara Timur,
Tahun 2009-2011

(Juta Rupiah)

RINCIAN	2009	2010 *)	2011 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Konsumsi Rumah Tangga	17.220.569,4	19.694.380,2	22.349.363,8
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	895.279,5	1.041.283,2	1.212.370,9
3. Konsumsi Pemerintah	5.098.845,0	6.167.002,1	7.052.797,2
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.702.522,2	4.568.456,3	5.488.722,2
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	4.887.824,1	5.331.313,6	5.855.950,1
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	9.089.186,6	10.862.813,8	13.198.760,1
7. Perubahan Stok ^{r)}	1.463.558,5	1.799.138,5	2.443.962,2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	24.179.412,2	27.738.760,2	31.204.406,4
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Konsumsi Rumah Tangga	10.342.243,9	10.492.320,7	10.801.283,0
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	500.801,0	532.031,1	567.052,4
3. Konsumsi Pemerintah	2.380.155,0	2.648.691,4	2.793.859,7
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.658.492,9	1.820.456,4	2.015.371,7
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	3.673.541,5	3.718.326,7	3.787.211,7
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	7.071.635,9	7.529.639,0	8.080.927,3
7. Perubahan Stok ^{r)}	437.003,5	861.634,8	1.365.869,0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11.920.601,9	12.543.822,0	13.249.720,2

Keterangan : ^{r)} Residual

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 2
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan,
Tahun 2009-2011

<i>(Persen)</i>			
RINCIAN	2009	2010 *)	2011 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Konsumsi Rumah Tangga	71,22	71,00	71,62
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	3,70	3,75	3,89
3. Konsumsi Pemerintah	21,09	22,23	22,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	15,31	16,47	17,59
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	20,21	19,22	18,77
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	37,59	39,16	42,30
7. Perubahan Stok ^{r)}	6,05	6,49	7,83
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Konsumsi Rumah Tangga	86,76	83,65	81,52
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	4,20	4,24	4,28
3. Konsumsi Pemerintah	19,97	21,12	21,09
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	13,91	14,51	15,21
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	30,82	29,64	28,58
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	59,32	60,03	60,99
7. Perubahan Stok ^{r)}	3,67	6,87	10,31
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

Keterangan : r) Residual

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 3
Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto
Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan,
Tahun 2009-2011

<i>(Persen)</i>			
RINCIAN	2009	2010 *)	2011 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Konsumsi Rumah Tangga	111,99	114,37	113,48
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	111,09	116,31	116,43
3. Konsumsi Pemerintah	110,97	120,95	114,36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	127,44	123,39	120,14
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	107,89	109,07	109,84
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	109,40	119,51	121,50
7. Perubahan Stok ^{r)}	83,59	122,93	135,84
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	111,65	114,72	112,49
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Konsumsi Rumah Tangga	105,03	101,45	102,94
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	103,28	106,24	106,58
3. Konsumsi Pemerintah	102,38	111,28	105,48
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	115,80	109,77	110,71
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	101,31	101,22	101,85
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	100,49	106,48	107,32
7. Perubahan Stok ^{r)}	58,13	197,17	158,52
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	104,29	105,23	105,63

Keterangan : r) Residual

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 4
Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan,
Tahun 2009-2011

<i>(Persen)</i>			
RINCIAN	2009	2010 *)	2011 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Konsumsi Rumah Tangga	286.85	328.05	372.28
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	234.04	272.21	316.93
3. Konsumsi Pemerintah	572.28	692.16	791.58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	366.62	452.37	543.49
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	353.13	385.17	423.07
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	358.40	428.34	520.45
7. Perubahan Stok ^{r)}	198.26	243.72	331.07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	307.11	352.32	396.34
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Konsumsi Rumah Tangga	172.27	174.77	179.92
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	130.92	139.08	148.24
3. Konsumsi Pemerintah	267.14	297.28	313.57
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	164.22	180.26	199.56
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	265.40	268.63	273.61
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	278.85	296.91	318.64
7. Perubahan Stok ^{r)}	59.20	116.72	185.02
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	151.41	159.32	168.29

Keterangan : r) Residual

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 5
Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan,
Tahun 2009-2011

<i>(Persen)</i>			
RINCIAN	2009	2010 *)	2011 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	166,51	187,70	206,91
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	178,77	195,72	213,80
3. Konsumsi Pemerintah	214,22	232,83	252,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	223,25	250,95	272,34
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	133,05	143,38	154,62
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	128,53	144,27	163,33
7. Perubahan Stok ^{r)}	334,91	208,81	178,93
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	202,84	221,13	235,51

Keterangan : r) Residual

**) Angka Sementara*

****) Angka Sangat Sementara*

Tabel 6
Konsumsi Rumah Tangga Nusa Tenggara Timur,
Tahun 2009-2011

(Juta Rupiah)

RINCIAN	2009	2010 *)	2011 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Kelompok Makanan	13.135.380,7	15.032.350,7	17.076.947,9
2. Kelompok Bukan Makanan	4.085.188,7	4.662.029,5	5.272.416,0
KONSUMSI RUMAHTANGGA	17.220.569,4	19.694.380,2	22.349.363,8
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Kelompok Makanan	7.858.388,1	7.982.354,9	8.237.808,2
2. Kelompok Bukan Makanan	2.483.855,7	2.509.965,8	2.563.474,8
KONSUMSI RUMAHTANGGA	10.342.243,9	10.492.320,7	10.801.283,0

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Tabel 7
Ekspor Neto Nusa Tenggara Timur,
Tahun 2009-2011

(Juta Rupiah)

RINCIAN	2009	2010 *)	2011 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	4.887.824,1	5.331.313,6	5.855.950,1
a. Ekspor	43.887,2	49.495,2	54.077,6
b. Antar Pulau Keluar	4.843.936,9	5.281.818,5	5.801.872,5
2. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	9.089.186,6	10.862.813,8	13.198.760,1
a. Impor	239.315,6	285.755,9	329.905,8
b. Antar Pulau Masuk	8.849.871,0	10.577.057,9	12.868.854,3
EKSPOR NETO ¹⁾	(4.201.362,5)	(5.531.500,2)	(7.342.810,0)
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	3.673.541,5	3.718.326,7	3.787.211,7
a. Ekspor	28.043,8	28.585,2	28.883,6
b. Antar Pulau Keluar	3.645.497,7	3.689.741,5	3.758.328,1
2. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	7.071.635,9	7.529.639,0	8.080.927,3
a. Impor	117.958,7	121.108,3	123.709,8
b. Antar Pulau Masuk	6.953.677,2	7.408.530,7	7.957.217,5
EKSPOR NETO ¹⁾	(3.398.094,4)	(3.811.312,3)	(4.293.715,6)

Keterangan : 1) Ekspor Antar Pulau Keluar dikurangi Impor Antar Pulau Masuk

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 8
Penggunaan Produk Domestik Bruto Indonesia,
Tahun 2009-2011

(Miliar Rupiah)

RINCIAN	2009	2010 *)	2011 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	3.290.995,9	3.643.425,0	4.053.363,6
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	537.588,8	581.921,3	667.440,1
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.744.357,1	2.064.994	2.378.268,9
4. Perubahan Stok ^{r)}	(7.264,2)	31.580,7	55.594,6
5. Ekspor Barang dan Jasa	1.354.409,4	1.584.673,8	1.955.357,2
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.197.092,7	1.476.620,3	1.850.474,7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.606.203,4	6.436.270,8	7.427.086,1
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1.249.070,1	1.308.272,7	1.369.881,1
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	195.834,4	196.397,6	202.611,5
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	510.085,9	553.347,7	602.146,7
4. Perubahan Stok ^{r)}	(2.065,2)	11.041,1	21.858,7
5. Ekspor Barang dan Jasa	932.248,6	1.074.568,7	1.220.428,3
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	708.528,8	831.418,3	942.208,3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2.178.850,4	2.313.838,0	2.463.242,0

Keterangan : r) Residual

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 9
Peranan Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut
Penggunaan,
Tahun 2009-2011

(Persen)

RINCIAN	2009	2010 *)	2011 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	58,70	56,61	54,58
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,59	9,04	8,99
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,11	32,08	32,02
4. Perubahan Stok ^{r)}	(0,13)	0,49	0,75
5. Ekspor Barang dan Jasa	24,16	24,62	26,33
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	21,35	22,94	24,92
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

Keterangan : r) Residual

**) Angka Sementara*

****) Angka Sangat Sementara*

DAFTAR PUSTAKA

- Beckerman. W. (1968) *An introduction to national income analysis*. Weidenfeld and Nicholson
- BPS (2000) *Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kota: Tata Cara Penghitungan Menurut Penggunaan*. Buku 3
- BPS (2006) *Laporan Perekonomian Indonesia 2007*
- BPS (2006) *Pendapatan Nasional Indonesia 2000 - 2007*
- BPS NTT (2006) *Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan 2005 -2007*
- Glasson. J. (1990) *Pengantar Perencanaan Regional.diterjemahkan oleh Paul Sitohang*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Marsisno.W. (2000) "*PDRB Menurut Penggunaan dan Manfaatnya dalam Perencanaan Pembangunan*". naskah bahan diskusi intern. tidak dipublikasikan
- Partadiredja. A. (1993) *Perhitungan Pendapatan Nasional*. cetakan ke delapan. LP3ES
- Prayitno.H.Santosa.B. (1996) *Ekonomi Pembangunan*. Ghalia Indonesia
- Todaro. M. P. (1986) *Perencanaan Pembangunan : Model dan Metode*. dialihbahasakan oleh Siswo Suyanto. CV Inter Media

<https://ntt.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. R.Suprpto No.5 Kupang 85111
Telp.: (0380) 826289, 821755 - Fax. (0380) 833124
E-mail: bps5300@bps.go.id